

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode/Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
- Sebesar : Rp. 168.800.000 (SERATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 168.800.000
Rp. 168.800.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 168.800.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN R E N G A T (092) Rp. 168.800.000

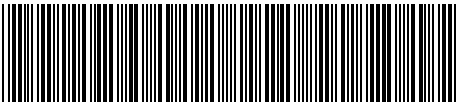
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2026
I A. INFORMASI KINERJA

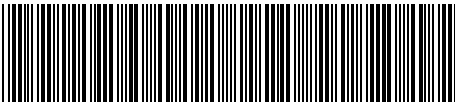


DS:7423-3693-4037-4736

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

				Halaman : I A. 1
Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	168.800.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	168.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
		2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
		4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
		5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
		6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
		7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
		8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
		10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
		11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
		15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
		16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
		17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
		18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
		19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
		20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7423-3693-4037-4736

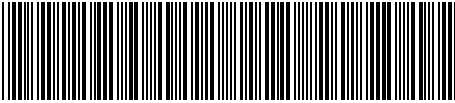
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum									
		21.	14	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)					
		22.	15	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi		2,00	kegiatan	3.000.000	
Rincian Output		:	01	AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.00	kegiatan	3.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		400,00	Perkara, Berkas Perkara	135.800.000	
Rincian Output		:	01	BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	400.00	Perkara	135.800.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		25,00	Orang	30.000.000	
Rincian Output		:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	25.00	Orang	30.000.000	

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2026
I B. SUMBER DANA



DS:7423-3693-4037-4736

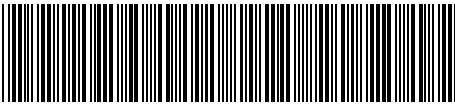
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	168.800.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	168.800.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7423-3693-4037-4736

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Kewenangan : (KD)

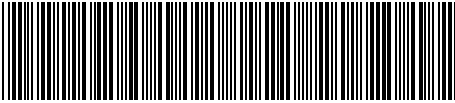
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	-	168.800	-	-	-	168.800	09 . 05	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	168.800	-	-	-	168.800		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	168.800	-	-	-	168.800		
1049.AEA	Koordinasi (09.05 RIAU / KAB. INDRAGIRI HILIR)	-	3.000	-	-	-	3.000		
01	RM	-	3.000	-	-	-	3.000		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (09.05 RIAU / KAB. INDRAGIRI HILIR)	-	135.800	-	-	-	135.800		
01	RM	-	135.800	-	-	-	135.800		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (09.05 RIAU / KAB. INDRAGIRI HILIR)	-	30.000	-	-	-	30.000	09 . 05	
01	RM	-	30.000	-	-	-	30.000	092	
JUMLAH		-	168.800	-	-	-	168.800		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7423-3693-4037-4736

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

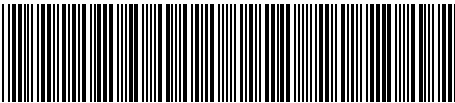
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.129	168.800
		BELANJA BARANG	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.129	168.800
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.129	168.800
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.129	168.800
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.363	16.587
		- PNBP (425232)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	92	1.170
		- PNBP (425233)	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	276	3.400
		- PNBP (425239)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	995	12.017

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2026
IV A. B L O K I R



DS:7423-3693-4037-4736

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [099217] PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

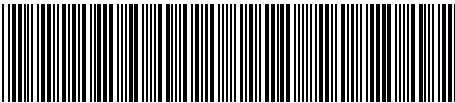
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7423-3693-4037-4736

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [099217] PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002